

## EFEKTIVITAS PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL SKEMA HUTAN KEMASYARAKATAN PADA KTH MANDIRI DAN KASIH SETIA DI KAWASAN HPT BIFEMNASI SONMAHOLE

*Effectiveness Of Social Forestry Program Of Community Forestry Scheme In Kth  
Mandiri And Kasih Setia In Sonmahole Bifemnasi Hpt Area*

Arcilia Florida Enjel Tae, Lusla Sulo Marimpan, Pamona Silvia Sinaga,  
Roni Haposan Sipayung  
Program Studi Kehutanan  
Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana

**ABSTRACT.** *The Social Forestry scheme under Community Forestry Community Forestry (HKm) is one form of legally granting access to forest-adjacent communities with the aim of conserving forest areas and improving the welfare of surrounding communities. This study aims to assess the effectiveness of the Community Forestry (HKm) program in the KTH Mandiri and KTH Kasih Setia groups within the Limited Production Forest Area (Hutan Produksi Terbatas/HPT) of Bifemnasi Sonmahole, from both social and economic aspects. A descriptive qualitative and quantitative approach was used, with data collected through observation, interviews, and documentation. The aspects analyzed include institutional management, area management, and business management as part of the social dimension, as well as the economic contribution of HKm products to the income of KTH members as part of the economic dimension. The results show that the effectiveness of the social aspect in both KTH Mandiri and KTH Kasih Setia is categorized as effective in terms of institutional management, with scores of 76.05% and 81.75%, respectively. Area management in KTH Mandiri (63.89%) and KTH Kasih Setia (70.61%) falls into the moderately effective category. Business management is also moderately effective, with scores of 72.48% for KTH Mandiri and 74.61% for KTH Kasih Setia. Economically, the contribution of HKm products to members' income is significant, with KTH Mandiri generating IDR 77,740,000 per year and KTH Kasih Setia generating IDR 82,200,000 per year. The main commodities include cashew (*Anacardium occidentale*) and candlenut (*Aleurites moluccana*). However, challenges such as limited training, inadequate facilities, and marketing issues remain obstacles to further development of HKm enterprises. .*

**Keywords:** *Social Forestry, Community Forestry (HKm), Forest Farmer Groups (KTH), Effectiveness.*

**ABSTRAK.** Perhutanan Sosial Skema HKm merupakan bentuk pemberian akses legal kepada masyarakat sekitar hutan bertujuan untuk melestarikan Kawasan hutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program Perhutanan Sosial skema HKm pada KTH Mandiri dan Kasih Setia di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Bifemnasi Sonmahole dinilai dari aspek sosial dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Aspek yang dianalisis meliputi kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha sebagai bagian dari aspek sosial, serta kontribusi ekonomi hasil HKm terhadap pendapatan anggota KTH sebagai bagian dari aspek ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas aspek sosial di KTH Mandiri dan Kasih Setia untuk kelola kelembagaan KTH Mandiri (76,05%) dan KTH Kasih Setia (81,75%) termasuk kategori efektif. Kelola Kawasan KTH Mandiri (63,89%) dan KTH Kasih Setia (70,61%) termasuk kategori cukup efektif. Selanjutnya kelola usaha KTH Mandiri (72,48%) dan KTH Kasih Setia (74,61%) termasuk kategori cukup efektif. Dalam aspek ekonomi, kontribusi hasil HKm terhadap pendapatan anggota cukup signifikan, yaitu KTH Mandiri sebesar Rp 77.740.000/tahun dan KTH Kasih Setia sebesar Rp 82.200.000/tahun, dengan komoditas unggulan Jambu mete (*Anacardium occidentale*) dan Kemiri (*Aleurites moluccana*).

**Kata kunci:** Perhutanan Sosial, HKm, Kelompok Tani Hutan (KTH), Efektivitas

**Penulis untuk korespondensi, surel :** [Archiilia12@gmail.com](mailto:Archiilia12@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 mendefinisikan hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sumber daya hutan mempunyai manfaat besar secara *intangible*, seperti perlindungan, pengatur tata air, mencegah erosi serta manfaat *tangible*, seperti menyediakan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, keanekaragaman satwa beserta sumber pangan (Rahmawaty, 2004). Pada tahun 2023 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat bahwa luas kawasan hutan Indonesia sebesar 125.664.550,9 Ha, yang terdiri dari luas daratan hutan sebesar 120.343.230 Ha dan luas perairan sebesar 5.321.321 Ha. Kawasan hutan menghadapi potensi konflik terkait pemanfaatan hutan, termasuk konflik lahan dan isu deforestasi. Berdasarkan data Forest Watch Indonesia (FWI), pada tahun 2023 Indonesia telah kehilangan 292.000 Ha hutan yang merujuk pada deforestasi.

Salah satu alternatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam menangani masalah dalam pengelolaan kawasan hutan dengan menggalangkan konsep Perhutanan Sosial yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 9 tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial. Perhutanan Sosial adalah suatu sistem pengelolaan hutan secara lestari dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk keseimbangan lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dinamika sosial budaya. Salah satu dari skema Program Perhutanan Sosial adalah HKm, yang pemanfaatan utamanya untuk memberdayakan masyarakat di dalam kawasan hutan negara.

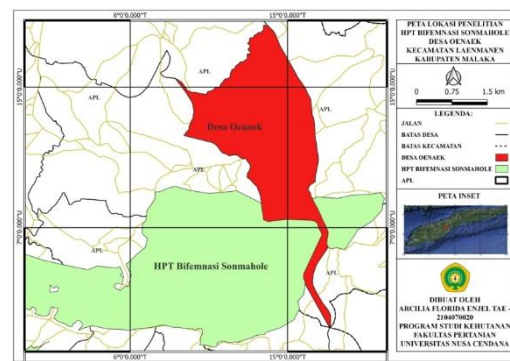
Perhutanan Sosial Skema HKm telah berjalan dalam kawasan HPT Bifemnasi Sonmahole. Kawasan HPT Bifemnasi Sonmahole merupakan kawasan hutan yang memiliki luas 3.083,80 ha dan ditetapkan berdasarkan melalui Register Tanah Kehutanan (RTK) 184. Dalam HPT Bifemnasi Sonmahole terdapat dua KTH di Desa Oenaek, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka,

yang bergabung dalam program HKm sejak tahun 2021 yaitu KTH Kasih Setia seluas  $\pm$  44 Ha, melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.7111/MENLHK-

PSKL/PKPS/PSL.0/11/2021 dan KTH Mandiri seluas  $\pm$  45 Ha, melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.7591/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/11/2021. Program ini dilaksanakan oleh pemerintah karena di kawasan HPT Bifemnasi Sonmahole, telah terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran hutan yang terjadi setahun sekali, penebangan liar yang sering terjadi setiap tahunnya serta pembukaan kawasan hutan menjadi perkebunan (Alfred et al., 2023). Sehingga, Program HKm ini menjadi solusi untuk akses legal pengelolaan kawasan hutan serta menambah pendapatan bagi masyarakat yang ada di kawasan HPT Bifemnasi Sonmahole. Tujuan penelitian yang akan dicapai sesuai dengan rumusan masalah di atas, yaitu untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program Perhutanan Sosial skema HKm pada KTH Mandiri dan Kasih di Kawasan HPT Bifemnasi Sonmahole dilihat dari aspek sosial dan ekonomi.

## METODE PENELITIAN

### Lokasi dan Waktu Penelitian



Gambar 1 Peta Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kawasan HPT Bifemnasi Sonmahole, di Desa Oenaek, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka. Penelitian dilaksanakan mulai pada bulan Januari - Februari tahun 2025. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif, sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Dengan metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik penarikan sampel

dilakukan dengan cara sensus yaitu mengambil seluruh responden anggota KTH Mandiri 27 orang dan Kasih Setia berjumlah 19 orang.

Analisis data aspek sosial akan diukur menggunakan skala *likert*. Terdapat tiga (3) item instrumen dalam menggunakan skala *likert* yang diberi skor dari *range* 1 sampai 3. Hasil perkalian bobot tersebut akan dijumlahkan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Skor Ideal} = T \times P_n$$

Keterangan:

T = total jumlah responden yang memilih

P<sub>n</sub> = pilihan angka skor *likert*

Selanjutnya akan dilakukan interpretasi skor perhitungan, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rumus Indeks\%} = \frac{\text{Total Skor}}{Y} \times 100$$

Nilai Y dicari dengan Rumus:

$$Y = \text{Skor tertinggi Likert} \times \text{Jumlah Responden}$$

Dengan Interval penilaiannya seperti disajikan pada Tabel 1.

Table 1 Skala Kategori Efektivitas

| No. | Kategori Nilai Tingkat Efektivitas |               |
|-----|------------------------------------|---------------|
|     | Kriteria                           | Interval Skor |
| 1.  | Efektif                            | 76% – 100%    |
| 2.  | Cukup Efektif                      | 57% – 75%     |
| 3.  | Tidak Efektif                      | <56%          |

Sumber: Wawan dan Dewi (2010)

Menurut Affandi dan Patanana (2002) dalam Batubara & Affandi (2017) nilai setiap produk KTH dapat dihitung dengan cara berikut:

1. Mengetahui harga pasar dari setia produk HKm.
2. Menghitung rata-rata nilai jumlah barang yang diambil dengan membandingkan jumlah barang yang diambil responden(kg) dengan jumlah pengambilan per jenis tanaman
3. Menghitung nilai ekonomi produk HKm per jenis barang per tahun dengan Total

pengambilan (unit/tahun) dikali Harga produk HKm (Rp)

4. Persentase nilai ekonomi, dapat dihitung menggunakan Nilai ekonomi HKm per jenis dibagi Jumlah total nilai ekonomi dari seluruh produk HKm
5. Tingkat kontribusi dari Hkm, dihitung dengan pendapatan dari HKm dibagi pendapatan total.

Kemudian akan dianalisis kesejahteraan anggota KTH dengan menggunakan metode *Good Services Ratio* (GSR) dengan rumusnya adalah:

$$\text{GSR} = \frac{C_p}{C_{jp}}$$

Dengan keterangan:

C<sub>p</sub> = Besarnya nilai konsumsi barang-barang (*goods*) kebutuhan pokok, berupa papan, sandang dan pangan.

C<sub>jp</sub> = Besarnya nilai konsumsi jasa (*services*), baik berupa kesehatan, pendidikan dan sebagainya

Dengan rasio metode *Good Services Ratio* (GSR) adalah:

GSR = > 1, berarti ekonomi rumah tangga kurang sejahtera

GSR = 1, berarti ekonomi rumah tangga sejahtera

GSR = < 1, berarti ekonomi rumah tangga lebih sejahtera

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Data Aspek Sosial

#### a. ) Kriteria Kelola Kelembagaan

Kelembagaan berfungsi mengatur pengelolaan dengan cara mengawasi dan mengontrol pengelolaan sumberdaya agar tetap lestari (Salaka *et al.*, 2020 dalam Musdalifah *et al.*, 2023). Desa Oenaek, Kecamatan Laenamnen, Kabupaten Malaka terdiri atas KTH Mandiri yang berjumlah 27 orang dan Kasih Setia yang berjumlah 19 orang. Tujuan utama dari pembentukan KTH agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dapat mengakses sumberdaya hutan secara legal. Untuk menilai keberhasilan dari Program HKm diperlukan kelola kelembagaan yang efektif dalam KTH. Dalam penelitian ini untuk mengukur kelola kelembagaan KTH berdasarkan indikator sebagai berikut:

- (1) terdapat dokumen yang memuat nama pengurus serta anggota KTH

Pada indikator pertama terdapat dokumen yang memuat nama-nama anggota KTH yang bergabung dalam Program HKm dengan diperoleh kategori yang didapat sebesar 100% yang termasuk dalam kategori efektif. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dimana terdapat dokumen yang memuat nama-nama anggota KTH Mandiri dan Kasih Setia yang tertuang dalam SK.7111/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/11/2021 dan SK.7591/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/11/2021.

- (2) terdapat struktur organisasi yang jelas yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dalam KTH

Struktur organisasi diperlukan untuk memastikan tugas-tugas dijalankan secara efektif dan efisien, serta saling menguntungkan antar anggota. Diketahui bahwa terdapat struktur organisasi yang jelas dalam KTH Mandiri dan Kasih Setia dengan diperoleh kategori yang didapat sebesar 100% yang termasuk dalam kategori efektif. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dan observasi yang dilakukan bahwa dalam KTH Kasih Setia dan Mandiri terdapat struktur organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Hal ini memang karena salah satu persyaratan pengusulan Izin Usaha Pemanfaatan HKm adalah dengan melampirkan susunan pengurus KTH sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) huruf a PermenLHK No.9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

- (3) terdapat penjelasan peran dan tugas setiap anggota KTH

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penjelasan peran dan tugas setiap anggota KTH Mandiri sebesar 75,31% dan KTH Kasih Setia sebesar 61,40% yang termasuk dalam kategori cukup efektif. Karena berdasarkan hasil wawancara dan observasi ditemukan bahwa pengurus dan anggota KTH Mandiri dan Kasih Setia HKm mengetahui tugas masing-masing akan tetapi peran dalam tugas tersebut sangat minim. Padahal peran dan tugas setiap anggota KTH sangat mempengaruhi lembaga KTH tersebut dimana dijelaskan dalam pernyataan Mardikanto, (1993) dalam Dhiu, (2024) bahwa faktor penting yang mempengaruhi dinamika kelompok

adalah seperangkat tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota kelompok sesuai dengan kedudukannya dalam struktur kelompok tertentu.

- (4) terdapat kelengkapan KTH yang meliputi daftar hadir, buku surat menyurat, buku tamu

Menurut Mardikanto (1993) dalam Wijaya *et al.*, (2020), administrasi adalah fungsi spesifik yang bertujuan untuk mengarahkan, mengelola, mengembangkan, dan melaksanakan kegiatan organisasi melalui seorang administrator. Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan administrasi KTH Mandiri sebesar 55,56%, yang termasuk dalam kategori tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kelengkapan administrasi penunjang, seperti buku tamu dan buku surat menyurat, yang terungkap melalui wawancara dan observasi. Administrasi yang tersedia hanya mencakup dokumen keanggotaan dan daftar hadir. Hal ini berbanding terbalik dengan kelengkapan administrasi KTH Kasih Setia sebesar 92,98% yang dikategorikan efektif. Perbedaan ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki ketua kelompok KTH tersebut. Dimana sumber daya manusia yang berkualitas dipengaruhi oleh tingkat itu pendidikan sendiri sehingga pengelolaan administrasi kelompok masih lemah (Ukkas, 2017). Padahal untuk bisa menjalankan suatu roda organisasi dengan baik dan terarah maka catatan administrasi menjadi mutlak dan sangat penting diperlukan karena semua kegiatan kelompok terdokumentasikan dengan baik (Wijaya *et al.*, 2020).

- (5) terdapat jadwal pertemuan antara pengurus dan anggota kelompok

Pertemuan kelompok merupakan suatu wadah penting untuk pengembangan kapasitas anggota KTH melalui pertukaran informasi, pengalaman, serta pengetahuan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diperoleh dapat diketahui bahwa pertemuan antara pengurus dan anggota KTH KTH Mandiri sebesar 49,38% dan KTH Kasih Setia sebesar 54,39% yang termasuk dalam kategori tidak efektif. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa KTH Mandiri dan KTH Kasih Setia tidak memiliki jadwal pertemuan yang



disepakati secara tertulis, Meskipun demikian, pertemuan biasanya tetap berlangsung minimal satu kali dalam sebulan, umumnya bertepatan dengan kunjungan dari penyuluh kehutanan dari KPH Kabupaten Belu-Malaka. Selain itu tingkat partisipasi anggota dalam pertemuan KTH hutan sangat minim hal ini karena disibukan dengan kegiatan bertani mereka serta kurangnya komunikasi yang disampaikan antar anggota KTH. Padahal kurang partisipasi masyarakat dalam pertemuan dalam pernyataan Oktoyoki *et al.*, (2023) kondisi ini dapat menyebabkan informasi yang diperoleh oleh Anggota KTH dalam setiap pertemuan akan sulit tersebar.

#### b.) kriteria kelola kawasan

Kelola kawasan adalah suatu kegiatan yang difokuskan pada pengelolaan lahan yang digunakan sebagai mata pencarian dengan mengamankan kawasan hutan dan tetap menjaga kelestarian lingkungan (Fito *et al.*, 2020 Musdalifah *et al.*, 2023). KTH Mandiri dan Kasih Setia menggunakan sistem pemanfaatan kawasan dengan pola agroforestri.



Gambar 2. Lahan KTH Mandiri dan Kasih Setia.

Dalam mengukur kelola kawasan HKm didasarkan pada indikator sebagai berikut:

##### (1) keterlibatan Anggota KTH terhadap HKm;

Melalui keterlibatan anggota KTH terhadap HKm, KTH tidak hanya menjadi wadah pengelolaan hutan, tetapi juga menjadi pilar pemberdayaan masyarakat yang Mandiri dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan keterlibatan anggota KTH Mandiri sebesar 45,68% yang termasuk dalam kategori tidak efektif dan KTH Kasih Setia sebesar

59,65%, yang mana termasuk dalam kategori tidak efektif. Hal ini didasarkan karena minimnya keikutsertaan pengurus dan anggota dalam rapat yang dilakukan sehingga kurangnya informasi yang didapat, minimnya keterlibatan anggota KTH Mandiri dan Kasih Setia dalam menjadikan lahan HKm menjadi lahan pertanian sehingga lahan HKm dibiarkan terbengkalai. Selain itu adanya anggota KTH yang bekerja di luar pulau sehingga tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan HKm dan hanya diteruskan oleh keluarga. Padahal partisipasi anggota KTH merupakan suatu bentuk usaha untuk meningkatkan efisiensi, pembagian pengetahuan, semangat kerja tim, peningkatan kreativitas dan inovasi, penguatan keputusan bersama serta peningkatan kepatuhan (Luswaga dan Nuppenau, 2020 dalam Oktoyoki *et al.*, 2023).

##### (2) program HKm yang dilakukan oleh KTH diberikan pemerintah;

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan program HKm yang dilakukan oleh KTH Mandiri dan Kasih Setia yang sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah sebesar 71,60% dan 68,42% yang termasuk dalam kategori cukup efektif. Anggota KTH Mandiri sudah melakukan kewajiban yang tertuang dalam SK Pemberian izin pengelolaan HKm seperti; menjaga areal hutan dari kerusakan, memberi tanda batas areal kerjanya, melakukan pemeliharaan dan penanaman dan tidak melakukan aktivitas dengan metode bakar. Namun demikian, implementasi program HKm masih belum sepenuhnya optima ada beberapa hal yang tidak/belum dilaksanakan yaitu menyusun rencana pengelolaan hutan, dan melakukan penatausahaan hasil hutan.

##### (3) sumber daya manusia yang dimiliki cukup dalam mengelola HKm

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan sumber daya manusia yang dimiliki oleh KTH Mandiri dan Kasih Setia sebesar 38,27% dan 54,39% yang termasuk dalam kategori tidak efektif. Ketidakefektifan sumber daya manusia ini karena, kurangnya kuantitas atau jumlah orang yang bekerja dalam lahan yang dimiliki oleh masing-masing anggota, dipengaruhi juga oleh adanya lahan pribadi

anggota KTH selain lahan HKm yang dimana difokuskan pada penanaman tanaman pertanian sehingga memerlukan perhatian yang lebih besar. Kemudian, kualitas dari anggota KTH yang masih rendah, dimana tingkat pengetahuan anggota tentang mengelola HKm masih minim, hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan anggota KTH. Hal ini sesuai dengan pernyataan Marsha, (2019) dalam Chairunnisa & Juliannisa, (2022) bahwa sumber daya manusia sebagai tenaga kerja yang dimiliki tidak hanya memiliki kualitas yang baik saja tetapi memiliki jumlah yang banyak juga.

- (4) adanya pembagian wilayah kerja untuk setiap anggota KTH.

Pembagian wilayah kerja pada masing-masing anggota merupakan suatu hal yang penting, karena dengan adanya pembagian wilayah kerja kepada anggota KTH maka akan lebih mudah dievaluasi dan dikontrol sehingga tidak terjadi konflik lahan (Dhiu, 2024). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan bahwa adanya pembagian wilayah kerja bagi masing-masing anggota KTH Mandiri dan Kasih Setia yaitu sebesar 100% yang termasuk dalam kategori efektif. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan setiap anggota KTH Mandiri dan Kasih Setia mempunyai lahan masing-masing dalam HKm yaitu sebesar 0,5 – 2 ha setiap anggotanya. Dengan adanya lahan yang dikelola sendiri oleh masing-masing anggota HKm akan memudahkan control dan pengelola sendiri di lahan masing-masing. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bowditch *et al.*, (2020) dalam Oktoyoki *et al.*, (2023) bahwa setiap anggota harus memiliki area tersendiri secara eksklusif untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan, agar sesuai dengan hak komunitas.

### c.) kriteria kelola usaha

Kelola usaha merupakan suatu upaya untuk menambah penghasilan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, melalui sumber daya yang dimiliki serta tenaga kerja yang ada (Musdalifah *et al.*, 2023). Dalam mengukur kelola usaha anggota KTH Mandiri dan Kasih Setia dalam HKm didasarkan pada indikator sebagai berikut:

- (1) terdapat program pembinaan yang diselenggarakan untuk meningkatkan

keterampilan dan pengetahuan anggota kelompok

Setiap KTH berhak mendapatkan pendampingan dalam pengelolaan HKm dalam mengembangkan usahanya, penyelesaian konflik, pendampingan penyusunan rencana kelola, rencana kerja usaha dan rencana kerja tahunan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan diperoleh bahwa program pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk meningkatkan keterampilan pada KTH Mandiri dan Kasih Setia sebesar 66,67% yang termasuk dalam kategori Cukup efektif. Hal ini karena berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam proses pendampingan KTH Mandiri dan Kasih Setia dari Pendampingan penyuluh KPH Kabupaten Belu-Malaka hanya terbatas pada pendampingan dalam rapat biasa, tetapi belum ada program pelatihan usaha serta seminar yang diadakan, sehingga untuk meningkatkan keterampilan anggota KTH dalam mengelola produk HKm masih sangat minim. Hal ini sejalan dengan pernyataan Markum, *et al.*, (2015) dalam Dhiu, (2024) bahwa permasalahan bagi pemegang izin HKm adalah lemahnya dukungan pembinaan dari pihak pemerintah tentang pelatihan teknis dalam mengelola HKm yang baik. Padahal tujuan dari pendampingan kelompok yaitu meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, meningkatkan kemandirian kelompok, dan meningkatkan kesejahteraan kelompok.

- (2) Terdapat sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah dalam mengembangkan produk HKm

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sarana merupakan sesuatu yang merujuk pada berbagai alat atau media yang digunakan dalam mencapai tujuan tertentu dan prasarana merupakan suatu komponen yang berfungsi sebagai elemen penunjang utama bagi terlaksananya suatu tujuan yang dituju. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan bahwa sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah dalam mendukung pengelolaan lahan dan produk-produk HKm pada KTH Mandiri dan Kasih Setia sebesar 33,33% yang termasuk dalam kategori tidak efektif. Berdasarkan hasil wawancara serta observasi diketahui

bahwa KTH Mandiri dan Kasih Setia belum pernah menerima bantuan berupa alat kerja, obat-obatan tanaman maupun pupuk dalam mengelola lahan HKm. Padahal, keberadaan bantuan tersebut sangat penting untuk mendukung efektivitas pengelolaan hutan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Nonci, (2009) bahwa strategi dalam pengelolaan hutan secara eksplisit selain pentingnya penguatan kelembagaan masyarakat diperlukan pengembangan sarana dan prasarana pendukung usaha kehutanan.

(3) terdapat pemasaran hasil hutan dari produk program HKm

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan diketahui bahwa pemasaran hasil hutan dari produk HKm KTH Mandiri sebesar 83,95% dan Kasih Setia sebesar 75,44% yang termasuk dalam kategori efektif. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan pemasaran hasil hutan yang dilakukan oleh KTH Mandiri dan Kasih Setia dari produk HKm dijual secara langsung kepada pengumpul yang datang ke desa Oenaek tanpa pengolahan lebih lanjut. Hal ini disebabkan pada kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi oleh anggota KTH Mandiri dan Kasih Setia. Hal ini, sesuai dengan pernyataan Hamdja *et al.*, (2015) bahwa tipe saluran yang dipilih petani saat menjual hasil hutannya didasarkan pada kondisi yang terjadi saat itu.

(4) Anggota KTH berpartisipasi dalam memasarkan produknya

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa dominan anggota KTH Mandiri dan Kasih Setia berpartisipasi sendiri dalam memasarkan produknya sebesar 82,72% dan 96,49% yang termasuk dalam kategori efektif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan produk-produk HKm yang dipasarkan sendiri berupa Jambu mete (*Anacardium occidentale*) dan Kemiri Kemiri (*Aleurites moluccana*) yang dijual kepada pengumpul yang datang ke Desa Oenaek untuk membeli hasil hutan. Menurut Imran *et al.*, (2024) partisipasi masyarakat menjadi suatu keharusan yang tidak dapat dihindari sebagai wujud dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kawasan HKm.

(5) anggota KTH memiliki hubungan yang baik dengan pembeli dan pelanggannya.

Hubungan yang baik antara pembeli merupakan salah satu faktor pendukung dalam meluncurkan penjualan produk HKm yang dimiliki oleh anggota kelompok tani hutan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan anggota KTH dan Mandiri memiliki hubungan yang baik terhadap pembeli produk HKm mereka yaitu sebesar 97,53% dan 98,25% yang termasuk dalam kategori efektif. Adanya hubungan yang baik antara pembeli dan pelanggan dalam konteks pemasaran produksi HKm, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas terhadap produk yang dihasilkan. Hubungan yang baik memungkinkan komunikasi yang efektif.

## 2. Analisis Data Aspek Ekonomi

Analisis data aspek ekonomi diperlukan untuk melihat seberapa besar nilai ekonomi yang didapatkan oleh KTH dari kontribusi lahan HKm. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada anggota KTH Mandiri dan Kasih Setia menanam tanaman pertanian, kehutanan dan memelihara ternak yaitu sapi dalam satu lahan HKm, dimana mereka melakukan sistem penanaman agroforestri. Tanaman pertanian seperti jagung, kacang tanah, kacang hijau, dan pepaya hanya digunakan untuk konsumsi sehari-hari bagi petani, selanjutnya Jambu mete (*Anacardium occidentale*) dan Kemiri Kemiri (*Aleurites moluccana*) dijual untuk menambah pendapatan bagi anggota KTH Mandiri dan Kasih Setia. Secara lengkap nilai ekonomi produk HKm dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 9 Nilai Ekonomi Produk HKm

| No     | Jenis Produk Hasil Hutan | Harga (Rp/kg) | Total Panen Produk HKm (Kg/Tahun) | X (Rata-rata panen (Kg/Thn) | NH (nilai ekonomi produk HKm) (Rp) | % NE (Persentase nilai ekonomi) |
|--------|--------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1      | Kemiri                   | 8.000         | 905                               | 33,52                       | 7.240.000                          | 4,53                            |
| 2      | Jambu mete               | 20.000        | 7.635                             | 177,56                      | 152.700.000                        | 95,47                           |
| Jumlah |                          |               |                                   | 211,08                      | 159.940.000                        | 100                             |

Sumber: Data Primer setelah diolah, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 9, diketahui bahwa total rata-rata jenis HKm adalah 211,08, dimana paling banyak dimanfaatkan yaitu Jambu mete. Hal ini karena Jambu mete merupakan komoditi utama secara kuantitas yang tumbuh di lahan HKm

anggota KTH. Nilai manfaat ekonomi merupakan upaya untuk menentukan nilai atau manfaat dari suatu barang atau jasa untuk kepentingan tertentu (Yudiansyah, 2018). Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 9 jumlah nilai ekonomi dari seluruh jenis hasil HKm yang dimanfaatkan sebesar Rp.159.940.000/tahun. Terdiri atas Jambu mete yang memberikan kontribusi paling besar yaitu sebesar Rp. 152.700.000/tahun, kemudian diikuti oleh Jambu mete sebesar Rp.7.240.000/tahun. Persentase nilai ekonomi hutan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar kontribusi yang dihasilkan oleh hasil hutan yang biasanya dinyatakan dalam bentuk Persentase. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 9 jumlah Persentase nilai ekonomi paling besar ditunjukkan pada hasil hutan Jambu mete yaitu berkontribusi sebesar 95,47%/tahun dan Kemiri (*Aleurites moluccana*) hanya berkontribusi sebesar 4,53%/tahun. Meskipun harga Kemiri lebih tinggi, kontribusi ekonominya tetap lebih rendah karena jumlah produksinya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Jambu mete yang ditanam secara luas dan menghasilkan volume panen yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa Jambu mete merupakan komoditas unggulan dalam sistem HKm yang memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi rumah tangga anggota KTH Mandiri dan Kasih Setia.

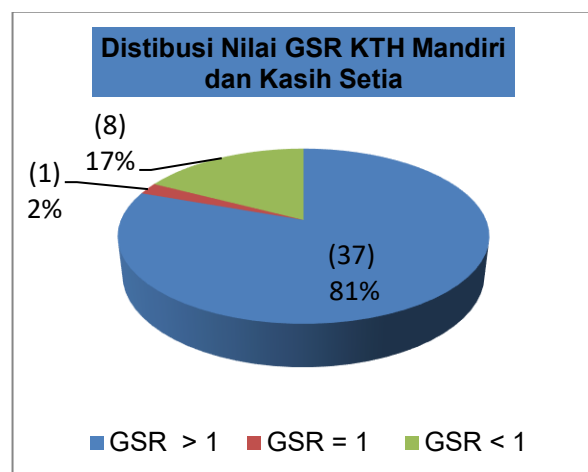
### 3. Analisis Kontribusi Produk HKM untuk Pendapatan Anggota KTH

Pendapatan KTH dari luar HKm adalah pendapatan yang didapat dari hasil kerja sampingan, serta hasil dari kebun lain anggota KTH. Kerja sampingan anggota KTH antara lain: Penjual sirih buah, ojek, penjual buah kelapa tukang bangunan, senso kayu serta pensiunan. Pendapatan di luar KTH per tahun sebesar Rp. 698.700.000. Pendapatan total didapatkan dari penjumlahan hasil pendapatan KTH dari produk HKm dan pendapatan KTH dari luar HKm, sehingga didapatkan hasilnya sebesar Rp. 858.640.000 per tahunnya. Dalam menentukan seberapa besar kontribusi Hasil HKm terhadap KTH Mandiri dan Kasih Setia dihitung dengan membagi pendapatan yang diperoleh dari hasil HKm dibagi hasil total seluruh pendapatan yang diterima kemudian dikalikan 100%, Hasilnya menunjukkan bahwa kontribusi HKm terhadap pendapatan KTH Mandiri adalah sebesar 9,05% dan terhadap KTH Kasih Setia sebesar 9,57%. Dengan demikian. Hal ini menunjukkan bahwa anggota KTH tidak mendapatkan hasil yang maksimal

dari hasil lahan HKm. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola HKm dimana anggota KTH memiliki beberapa lahan kebun secara pribadi yang ditanami tanaman pertanian yang membutuhkan perhatian lebih ekstra terhadap tanaman tersebut, sehingga tanaman yang ada di HKm tidak terlalu diperhatikan. Selain itu, pembersihan lahan HKm hanya dilakukan pada saat prapanen mengakibatkan persaingan untuk mendapatkan nutrisi yang masuk ke akar akan dibagi bersama tanaman lain dibawah Jambu Mete (*Anacardium occidentale*). Kemudian, kurangnya pengetahuan masyarakat untuk menjadikan produk Jambu Mete (*Anacardium occidentale*) dan Kemiri (*Aleurites moluccana*) sebagai produk olahan seperti kacang mete dan minyak kemiri dikarenakan keterbatasan ilmu yang didapat dan juga alat yang memadai. Serta, kurangnya kerjasama antara anggota KTH sendiri dalam mengelola lahan yang ada di HKm seperti membuat pagar karena banyak tumbuhan yang mati akibat dimakan oleh hewan ternak di dalam lahan kawasan.

### 4. Analisis Kesejahteraan KTH

Mengetahui tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat diukur dengan *Analisis Good Service Ratio* dengan membandingkan pengeluaran pangan dan pengeluaran non pangan. Suatu rumah tangga dikatakan sejahtera apabila *Analisis Good Service Ratio* apabila pemenuhan kebutuhan non-pangan lebih besar dari kebutuhan pangan. Hal ini menunjukkan bahwa petani dapat memenuhi semua kebutuhan pokok rumah tangganya hingga kebutuhan non-pangan.



Gambar 3 Diagram Distribusi Nilai GSR KTH Mandiri dan Kasih Setia



Berdasarkan Gambar 8 menunjukan bahwa dari 46 Anggota KTH, 8 orang dikategorikan sangat sejahtera, 1 orang KTH dikategorikan sejahtera dan 37 lainnya kurang sejahtera. Jumlah pengeluaran pokok KTH sebesar Rp. 493.200.00 per tahun dan pengeluaran non-pokok sebesar Rp.339.600.000 per tahun. Nilai Rata-rata GSR KTH Mandiri dan Kasih Setia adalah sebesar 1,84% yang tergolong kurang sejahtera. Kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Kurangnya kesejahteraan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang terdapat dalam penelitian, antara lain rendahnya partisipasi dan ketekunan anggota dalam mengelola lahan HKm, dimana terlihat dari nilai efektivitas keterlibatan anggota yang hanya mencapai 45,68% pada KTH Mandiri dan 59,65% pada KTH Kasih Setia. Selain itu, hasil analisis kelola kawasan menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang tersedia dinilai tidak efektif hal ini karena kurangnya kuantitas atau jumlah orang yang bekerja dalam lahan yang dimiliki oleh masing-masing anggota serta kualitas dari anggota KTH yang masih rendah, dimana tingkat pengetahuan anggota tentang mengelola HKm masih minim. Faktor lainnya adalah minimnya pembinaan dan pelatihan dalam pengembangan usaha, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pengolahan hasil hutan. Kendala-kendala ini menyebabkan hasil produksi dan nilai ekonomi yang dihasilkan belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan kesejahteraan anggota HKm.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfred, Dima, M. L., Gaol, K. M. N., Ati, V. M., & Bosu, B. (2023). Implementasi Kearifan Budaya Lokal Masyarakat ( Op ) lo Kufeu Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Biotropikal Sains*, 20(1), 7–13.
- Batubara, R., & Affandi, O. (2017). Nilai ekonomi hasil hutan non kayu dan kontribusinya terhadap pendapatan rumah tangga. *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan*, 12(2), 60–73.
- Rahmawaty. (2004). *Hutan: Fungsi Dan Peranannya Bagi Masyarakat Program Imu Kehutanan* (pp. 1–7).
- Forest Watch Indonesia. 2024. Diakses pada 4 Juni 2024, dari <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/ID>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320). [https://peraturan.bpk.go.id/Details/235324/permen\\_lhk-no-9-tahun-2021](https://peraturan.bpk.go.id/Details/235324/permen_lhk-no-9-tahun-2021)
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). *Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7111/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/11/2021 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan kepada Kelompok Tani Hutan Kasih Setia* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1374). <https://jdih.menlhk.go.id/>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). *Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7591/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/11/2021 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan kepada Kelompok Tani Hutan Mandiri* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1449). <https://jdih.menlhk.go.id/>
- Sari, Y., Senoaji, G., & Suhartoyo, H. (2019). Efektivitas Program Perhutanan Sosial Dalam Bentuk HKm Di Desa Tanjung Alam Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. *Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 8(1), 87-98.
- Musdalifah, Yusran, & Adrayanti Sabar. (2023). Tata Kelola Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Malaka 01 Hutan Kemasyarakatan di Desa Cenrana Baru Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. *Jurnal Kehutanan Papuasiasia*, 9(1), 18–28. <https://doi.org/10.46703/jurnalpapuasiasia.v0l9.iss1.424>
- Wijaya, B., Fauzi, H., & Hafizianor, H. (2020). Kinerja Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Sylva Scienteeae*, 3(1), 62–74.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan*

- Kehutanan Nomor  
P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018  
tentang Pedoman Kelompok Tani 63  
Hutan (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2018 Nomor 1123).  
<https://jdih.menlhk.go.id/>
- Dhiu, S. A. (2024). *Efektivitas Hutan Kemasyarakatan dalam program perhutanan sosial (Studi Kasus Di Desa Binaus, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan)*. Skripsi. Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana, Kupang.
- Ukkas, I. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Industri Kecil Kota Palopo. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 2(2), 187–198.  
<https://doi.org/10.24256/kelola.v2i2.440>
- Wijaya, B., Fauzi, H., & Hafizianor, H. (2020). Kinerja Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Sylva Scienteeae*, 3(1), 62–74.
- Larasati, A. P., Wulandari, C., Febryanto, I. G., & Kaskoyo, H. (2021). Peran Kelembagaan Gabungan Kelompok Tani Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. *Jurnal Belantara*, 4(1), 39–47.  
<https://doi.org/DOL:https://doi.org/10.29303/jbl.v4i1.448>
- Chairunnisa, C., & Juliannisa, I. A. (2022). Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Usia Dan Upah Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Di Dki Jakarta. *Jurnal Profit: Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 9(1), 62–72.  
<https://doi.org/10.36706/jp.v9i1.16878>
- Nonci, M. (2009). *Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Jeneponto* [Hasanuddin].  
<http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/7369/%0Ahttp://repository.unhas.ac.id/id/eprint/7369/2/muhammadnu-476-1-ps04871-2.pdf>
- Hamdja, F., Nurrochmat, D. R., & Yovi, E. Y. (2015). Analisis Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu (Hhbk) Kenari Di Pulau Makian Provinsi Maluku Utara. *Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan*, 2(1), 25.  
<https://doi.org/10.20957/jkebijakan.v2i1.10388>
- Imran, A. N., Muhlisa, A. N., Nirawati, & Rahmi. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Desa Bonto Manurung. (Studi Kasus Pada KTH Ujung Bulu Desa Bonto Manurung). *Jurnal Eboni*, 6(2), 1–7.  
<https://ejournals.umma.ac.id/index.php/eboni/index%0>